

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 56 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Keradjaan Nederland berhubung dengan berachirnja masa bekerdja Misi Militer Belanda pada achir tahun 1953;
- Mengingat : Persetudjuan Indonesia - Nederland mengenai Misi Militer Belanda di Indonesia tertanggal 29 Nopember 1950;
- Setelah mendengar : Dewan Menteri .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk suatu Perutusan Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan di Indonesia dengan Perutusan Keradjaan Nederland tentang Persetudjuan mengenai Misi Militer Belanda di Indonesia berhubung dengan berachirnja masa bekerdja Misi tersebut pada achir tahun 1953 dan segala sesuatu jang bertalian dengan itu;
- Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :
1. ROESLAN ABDULGANI, Sekretaris Djenderal Kementeri Penerangan, sebagai Ketua merangkap Anggota dengan gelar Duta Istimewa dan Menteri Berkuasa Penuh;
 2. Nr. F.W.M. TIWON, Kepala Direksi Hukum pada Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggota;
 3. MALIK SELAWAT, Wakil Kepala Djawatan Bea & Tjukai pada Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
 4. H.R. GONTHA, Kepala Seksi Eropa pada Kementerian Luar Negeri, sebagai Sekretaris;
 5. KOMODORE NUDA ROESLAN, (Angkatan Udara) sebagai Penasehat;
 6. MAJOR DJAELANI, (Angkatan Laut) sebagai Penasehat;
 7. KAPTEN SUPARDJO, (Angkatan Darat) sebagai Penasehat dan
 8. MCHAMMAD AMRIN, Inspektur Keuangan Thesaurier Djenderal pada Kementerian Keuangan sebagai Penasehat;

Ketiga :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

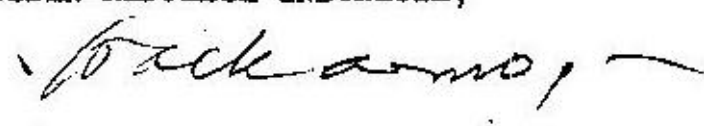
Ketiga : Segala perongkosan untuk Perutusan Republik Indonesia tersebut diatas dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri atas mata-anggaran 1.12.1.15., jang akan diatur dengan peraturan tersendiri.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Pertahanan a.i.,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Urusan Pegawai,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
9. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan
10. kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

PERDANA MENTERI,


WILOPO.